

LARANGAN PENJUALAN TANAH KAVLING OLEH DEVELOPER MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2011

Nama : Denok Tri Ambiwidjayanti

Program Studi : Magister Kenotariatan

Pembimbing : Prof. Dr.Khoidin, S.H.,CN., M.Hum.

ABSTRAK

Dasar perlarangan Penjualan tanah kavling adalah Pasal 146 ayat 1 UU Perumahan yang menyebutkan badan hukum (developer) yang membangun lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. Developer dapat memasarkan kavling melalui sistem PPJB dengan ketentuan dan syarat dalam perundang – undangan. Tujuan penelitian adalah mengetahui dasar pertimbangan adanya larangan penjualan tanah kavling dan bentuk perlindungan bagi pembeli tanah kavling. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif . Dari hasil penelitian dapat diketahui alasan perlarangan penjualan tanah kavling adalah agar developer dapat mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Kesepakatan antara developer dengan pembeli maka di buat perjanjian yang berupa PPJB, dimana akta tersebut di buat sebagai pembuktian yang sempurna apabila terjadi wanprestasi atau sengketa.

Kata Kunci : Tanah Kavling, Perlindungan , Undang – Undang

ABSTRACT

The basis for prohibiting the sale of plots of land is Article 146 paragraph 1 of the Housing Law which states that legal entities (developers) who build lisiba are

prohibited from selling mature land plots without a house. Developers can market plots through the PPJB system with the terms and conditions in the legislation. The purpose of the study was to find out the basis for consideration of the prohibition on the sale of plots of land and the form of protection for buyers of land lots. This research uses normative legal research. From the results of the study, it can be seen that the reason for the prohibition of selling plots of land is so that developers can realize housing with balanced housing. The agreement between the developer and the buyer is then made an agreement in the form of PPJB, where the deed is made as perfect evidence in the event of a default or dispute.

Keywords : Land plots, protection, constitution

